

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta meminimalisasi dampak bencana yang akan muncul seperti banjir, tanah longsor, dan penurunan kualitas lingkungan penduduk terutama di perkotaan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang (Pemendagri No. 28,2008).

Perda nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman disebutkan bahwa terdapat lima Kecamatan di Kabupaten Sleman yang akan digunakan sebagai kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kawasan ini nantinya akan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi, nasional, atau internasional. Kelima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Godean, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Ngemplak. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan upaya untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan perkotaan baru.

Kecamatan Depok menjadi salah satu kawasan yang direncanakan sebagai pusat kegiatan nasional dengan luas wilayah sebesar 35,55 km². Jika dilihat dari luas wilayahnya, Kecamatan Depok berada di urutan kedua sebagai kawasan pusat kegiatan nasional. Kecamatan terbesarnya adalah Kecamatan Ngemplak dengan

luas 35,71 km². Namun, berdasarkan data BPS tahun 2009-2016 Kecamatan Depok memiliki jumlah, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan kawasan pusat kegiatan nasional lainnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (perkm ²)	Pertumbuhan Penduduk (%) 2009-2016
1	Ngemplak	35,71	2009	54.484	1.526	16,20 %
			2016	65.016	1.821	
2	Depok	35,55	2009	124.234	3.495	34,19 %
			2016	188.771	5.310	
3	Gamping	29,25	2009	89.823	3.053	16,12 %
			2016	107.084	3.661	
4	Mlati	28,52	2009	92.601	3.247	17,34 %
			2016	112.021	3.928	
5	Godean	26,84	2009	62.969	2.346	11,61 %
			2016	71.239	2.654	

Sumber : BPS Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2009-2016

Laju jumlah, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk ini selaras dengan data perubahan penggunaan lahan Kecamatan Depok tahun 2009-2016 di mana terjadi peningkatan cukup besar berupa penggunaan lahan non pertanian dari 1.871,32 ha menjadi 2.767,76 ha atau terjadi peningkatan sebesar 32,36 % selama 7 tahun lihat Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Persentase Pertumbuhan Penggunaan Lahan Bangunan Pekarangan di Kecamatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2009-2016

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Penggunaan Lahan 2009-2016			
		Tanah Sawah	Bangunan Pekarangan	Tanah Kering	Lainnya
1	Ngemplak	-1,6 %	-1,43%	21,17%	-21,15%
2	Depok	-3,26 %	52,64%	3,42 %	-25,37 %
3	Gamping	1,71 %	9,71 %	14,73 %	-22,73 %
4	Mlati	-1,55 %	9,6 %	2,24%	-31,13%
5	Godean	-1,49 %	16,65 %	13 %	-28,17%

Sumber : BPS Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2009-2016

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Depok menjadi kawasan yang mengalami pertumbuhan bangunan pekarangan yang terbesar dibandingkan dengan Kecamatan Pusat Kegiatan Nasional lainnya. Hal ini tidak terlepas dari Kecamatan Depok yang memang sangat terkait dengan urbanisasi dan penambahan jumlah penduduk, apalagi setidaknya ada 36 kampus swasta, akademik, sekolah tinggi, politektik maupun kampus negeri (BPS, 2016). Tingginya arus kegiatan ekonomi dan sosial menyebabkan tingginya pula arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Artinya permintaan kawasan untuk permukiman atau tempat tinggal juga bertambah. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Khadiyanto, 2005). Lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi (Sujarto, 1985 dalam Untoro, 2006).

Tuntutan perkembangan tersebut tentu saja harus diimbangi dengan sebuah regulasi yang mampu mengontrol serta mengendalikan laju pertumbuhan perkotaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan yang berimbas ke seluruh wilayah yang berada di sekitarnya. Salah satunya ialah mengatur tata rencana sebuah zona area sebuah wilayah kabupaten, baik secara makro maupun secara detail dan terperinci. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah guna mengatur pertumbuhan penggunaan lahan dalam usaha mengatur tata ruang dalam UU No 12 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031.

Teknologi penginderaan jauh semakin berkembang melalui kehadiran berbagai sistem satelit dengan berbagai misi dan teknologi sensor. Aplikasi satelit penginderaan jauh telah mampu memberikan data atau informasi tentang sumberdaya alam dataran dan sumberdaya alam kelautan secara teratur dan periodik. Sebuah citra dapat mencakup area yang sangat luas, sehingga sebuah wilayah memungkinkan untuk diamati, dipelajari, dan dianalisis secara regional

(Suharyadi, 2001). Ada beberapa jenis data dalam penginderaan jauh antara lain foto udara dan citra satelit. Penggunaan citra satelit lebih menguntungkan dalam hal resolusi temporal (periode perekaman daerah yang sama), dan cakupan daerah yang luas dibandingkan dengan foto udara. *Citra Geo-eye1* merupakan salah satu jenis citra penginderaan jauh resolusi tinggi dengan resolusi spasial sebesar 0,46 m untuk pankromatik dan 1,84 m untuk multispektral. Fitur satelit *Geo Eye-1* digunakan untuk sistem penginderaan jauh komersial, dirancang untuk proyek besar yang dapat merekam 350.000 km² *pan-sharphen* multispektral setiap hari. Besaran resolusi spasial citra *Geo-Eye1* yang tinggi menyebabkan kemudahan dalam interpretasi citra guna pemetaan detail dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. bagaimana kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok , Kabupaten Sleman, Yogyakarta?, dan
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. menganalisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan
2. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang Ruang (RDTR) Kecamatan Depok , Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk keperluan berikut :

(1) Ilmiah

Sebagai salah satu aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam (1) menganalisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Depok Sleman, Yogyakarta,

(2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Depok Sleman, Yogyakarta, dan

(2) Praktis

Sebagai sumber informasi mengenai kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang sebagai bentuk evaluasi terhadap instansi terkait khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

A. Perencanaan Wilayah

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Masalah terpenting dalam upaya pembangunan wilayah yang terpenting menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses *input-output* barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2007).

Perencanaan wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja (Jhingan, 2000). Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara:

1. secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah;
3. menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
4. melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Solihin, D, 2005).

Menurut Archibugi (2008) berdasarkan penerapan teori perencanaan wilayah dapat dibagi atas empat komponen yaitu :

- (a) *Physical Planning* (Perencanaan fisik). Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Teori perencanaan ini telah membahas tentang kota dan sub bagian kota secara komprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah perencanaan wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam bentuk *master plan* (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan).

- (b) *Macro-Economic Planning* (Perencanaan Ekonomi Makro). Dalam perencanaan ini berkaitan perencanaan ekonomi wilayah. Mengingat ekonomi wilayah menggunakan teori yang digunakan sama dengan teori ekonomi makro yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan investasi. Perencanaan ekonomi makro wilayah adalah dengan membuat kebijakan ekonomi wilayah guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, tabungan).
- (c) *Social Planning* (Perencanaan Sosial). Perencanaan sosial membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaan sosial diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis.
- (d) *Development Planning* (Perencanaan Pembangunan). Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan wilayah.

B. Dinamika Perubahan Lahan dan Perencanaan Wilayah

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar (Zulkaidi, 1999). Peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, sedangkan disisi lainnya kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini diserasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan lahan yang optimal, yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dengan meminimumkan dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Optimasi yang memuaskan semua pelaku yang terlibat tidak selalu dapat dicapai, dan ini juga tidak selalu sama untuk kasus-kasus dan lokasi pemanfaatan lahan yang dihadapi. Pengertian pemanfaatan atau dialihfungsikan lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sebidang lahan dari satu pemanfaatan ke pemanfaatan lainnya. Kajian ekonomi lahan menyatakan pengertian ini sering dilokasikan pada proses dialihgunakan khusus dalam dinamika perkembangan pusat kota (Zulkaidi, 1999). Proses perubahan yang terjadi dibagi kedalam 7 tahap berikut :

1. proses awal (*inception*), yaitu nilai berkembangnya suatu kawasan sebagai calon pusat kota bersama-sama mulai berkembangnya suatu kota.
2. eksklusi (*ekklusion*), yaitu terjadinya penonjolan nilai lahan tertinggi di pusat kota sehingga kawasan pusat kota menjadi eksklusif.
3. proses segregasi, yaitu terjadinya pemisahan kawasan fungsional baru di luar kawasan pusat kota.
4. proses perluasan (*ekstension*), yaitu terjadinya pemisahan kawasan pusat kota akibat bertambahnya jumlah kegiatan dan meluasnya jangkauan pelayanan.
5. proses peniruan dan penyesuaian (*replication and readjustment*), yaitu munculnya fungsi serupa pusat kota, terutama pusat perbelanjaan dipinggiran kota akibat terjadinya perluasan wilayah terbangun kota yang ada pada gilirannya menimbulkan penyesuaian di pusat kota lama.
6. proses peremajaan (*redevelopment*), yaitu dilakukannya peremajaan pusat kota akibat adanya dinamika perubahan karakter maupun kegiatan di dalamnya.
7. realisme kota, yaitu terjadinya hubungan berjenjang di suatu kota, di mana pusat kota menjadi lokasi terpenting sementara kawasan-kawasan lainnya mengerutkan diri ke dalam jenjang yang lebih rendah.

C. Penataan Ruang

Penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Pasal 1 Butir 1 UUPR menyebutkan pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sendiri terbagi dalam beberapa kategori, berikut :

- i. ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
- ii. ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
- iii. ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya .

Undang-undang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Pengertian wilayah dalam Pasal 1 Butir 17 UUPR adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Pengertian kawasan dalam Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Ruang dalam wilayah nasional adalah wadah bagi manusia untuk melakukan kegiatannya. Hal ini tidaklah berarti bahwa ruang wilayah nasional akan dibagi habis oleh ruang-ruang yang diperuntukan bagi kegiatan manusia (fungsi budidaya) akan tetapi harus dipertimbangkan pula adanya ruang-ruang yang mempunyai fungsi lindung dalam kaitannya terhadap keseimbangan tata udara, tata air, konservasi flora dan fauna serta satu kesatuan ekologi. Pasal 1 Butir 2 UUPR, menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tata

ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang dalam Pasal 1 Butir 3 UUPR adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedang pola ruang dalam Pasal 1 Butir 4 adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pengertian penataan ruang dalam Pasal 1 Butir 5 UUPR adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (3) UUPR maka penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

D. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

D.1 Pemahaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Penataan Ruang Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana distribusi pemanfaat ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Penataan tersebut bertujuan untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman, dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTRK kegiatan berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya (Pemendagri No. 28,2008).

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam wilayah kota. Rencana Detail Tata Ruang juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional kota sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitannya antar kegiatan fungsi dalam kawasan, agar tercipta lingkungan yang serasi, selaras, seimbang, dan

terpadu. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan, dan pembangunan kawasan. Lingkup wilayah yang diatur dalam RDTRK meliputi sebagian wilayah atau seluruh wilayah administrasi kota atau beberapa kawasan tertentu dengan skala kedetilan minimal 1 : 5.000. Isi dari RDTRK meliputi kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat pelayanan, rencana sistem jaringan fungsi jalan, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan lingkungan dan rencana ketinggian bangunan (Pemendagri No. 28,2008).

G.2 Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang Penggunaan Lahan

Rencana Detail Tata Ruang merupakan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Rencana Detail Tata Ruang adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini. Beberapa literatur menggunakan istilah penyimpangan penggunaan lahan sebagai padanan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana penggunaan lahan. Restina (2009) dalam tesisnya, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan adalah,kepadatan penduduk, luas lahan pertanian, bangunan di bantaran sungai dan jarak ke pusat kota. Faktor sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan pendapatan, kepemilikan lahan serta tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang yang rendah akibat kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.

G.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang

Implementasi rencana tata ruang adalah sebuah tindakan nyata dari produk rencana yang telah dibuat sebagai upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang diinginkan supaya berdampak pada kelompok sasaran (Dilang, 2008). Ginting (2010) dalam tesisnya menyatakan bahwa kemampuan dalam melaksanakan rencana (implementabilitas) dipengaruhi

oleh empat faktor yaitu : teknik, politik, ekonomi, dan sosial.

Implementabilitas Rencana Detail Tata Ruang Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) Kabupaten Sleman menurutnya tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi namun lebih dipengaruhi oleh :

1. faktor teknik, sistem hierarki kota dan lokasi wilayah;
2. faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan; dan
3. faktor sosial.

Menurut Edward, (1980 dalam Suharyono, 2000), sebuah implementasi setidaknya dipengaruhi oleh faktor sumberdaya, disposisi (komitmen penentu kebijakan), komunikasi (kecepatan dan kejelasan informasi antar unit pelaksana) dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi peraturan penataan ruang adalah : kelembagaan, aparat pelaksana, pengawasan dan pengendalian, pendanaan serta adat istiadat masyarakat yang kondusif. Dilang (2008) menyatakan terdapat dua hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : kualitas rencana dan kemampuan kelembagaan yang baik.

Hal-hal yang membuat suatu kebijakan, rencana atau program menjadi tidak berhasil antara lain: terjadinya inkonsistensi aparat penyusun/pelaksana rencana atau program, sumberdaya aparatur pemerintah yang lemah dan substansi rencana yang tidak matang (Dilang, 2008). Laurensius (1996) menyebutkan sebuah rencana tata ruang wilayah akan terhambat apabila terdapat faktor penghambat yaitu : adanya loyalitas ganda para pelaksana serta timbulnya hambatan dari lingkungan sosial maupun alam.

E. Lahan

Lahan dapat diartikan sebagai *land settlemen* yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan pemanfaatan ruang/lahan untuk tumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitas baik sosial maupun ekonomi sesuai fungsi dari lahan yang berbeda-beda (Bintarto, 1977).

F. Penggunaan Lahan

Menurut Arsyad (1989) mengemukakan bahwa penggunaan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Penggunaan lahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu :

- (1) penggunaan lahan pertanian, dan
- (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan pertanian dibedakan ke dalam jenis penggunaan berdasarkan atas penyediaan air dan bentuk pemanfaatan di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dikenal macam penggunaan lahan : (1) tegalan, (2) sawah, (3) perkebunan, (4) padang rumput, (5) hutan produksi, (6) hutan lindung, dan (7) padang alang-alang. Penggunaan lahan bukan pertanian dibedakan ke dalam beberapa bagian seperti: (1) pemukiman, (2) industri, (3) tempat rekreasi, dan (4) pertambangan.

G. Perubahan Penggunaan Lahan

Pertambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan lahan. Sifat lahan yang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan-lahan yang sebelumnya merupakan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Martin, 1993 dalam Wahyunto dkk., 2001). Seseorang melakukan perubahan penggunaan lahan dengan maksud untuk memaksimalkan sumberdaya lahan tersebut sehingga diharapkan akan memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Berbagai fenomena perubahan penggunaan lahan telah terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk yang secara langsung berdampak

pada kebutuhan terhadap lahan yang semakin meningkat. Perubahan penggunaan di Kecamatan Depok yang terjadi diduga oleh meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya aktivitas sosial dan ekonomi. Perubahan penggunaan lahan yang merupakan imbas dari tingginya aktivitas sosial dan ekonomi pusat kota dapat dipelajari dengan menggunakan suatu pendekatan, salah satunya pendekatan dengan analisa keruangan (*spatial analysis*). Analisa keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

H. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan

Lahan sebagai suatu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat memiliki sifat dinamis, artinya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (terkait jenis penggunaannya). Perubahan penggunaan lahan merupakan suatu proses yang berjalan seiring perkembangan jumlah dan aktivitas penduduk. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya faktor dominan yang mempengaruhinya. Ada 4 proses utama yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan (Bourne, 1982 dalam Brian Erfino W., 2014) yaitu :

1. perluasan batas kota;
2. peremajaan pusat kota;
3. perluasan jaringan infrastruktur;
4. tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu misalnya, tumbuh aktivitas industri dan pembangunan aktivitas industri dan pembangunan sarana rekreasi atau wisata.

Selain itu, menurut (Cullingsworth, 1997) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni :

1. adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya;
2. aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota;
3. jaringan jalan dan sarana transportasi, dan
4. orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi.

Chapin (1979) juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu topografi, penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana, dan prasarana serta daya dukung lingkungan. Merangkum kedua pendapat di atas mengenai faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan yang pada akhirnya akan mengarah ke perubahan penggunaan lahan, tingkah laku serta tindakan manusia merupakan faktor penentu perubahan penggunaan lahan. Hal ini telah menjadi hukum alam untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terkait kehidupan ekonomi dan sosial. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat di deskripsikan secara tidak langsung akan mempengaruhi penggunaan lahan yang pada akhirnya akan mengarah ke perubahan penggunaan lahan yang berbeda dari kondisi awalnya.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan analisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap rencana detail tata ruang berikut :

Anita Dwijayanti, Teguh Hariyanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Tutupan Lahan Permukiman Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Surabaya Pada Citra Resolusi Tinggi Dengan Metode Klasifikasi Berbasis Objek Studi Kasus : UP XI Tambak Osowilangon Dan UP XII Sambikerep)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tutupan lahan khususnya permukiman menggunakan metode klasifikasi berbasis objek terhadap RDTRK. Metode penelitian yang digunakan yakni metode klasifikasi berbasis objek dengan menggunakan segmentasi dan *merging* dalam prosesnya. Hasil klasifikasi berbasis objek citra *WorldView-2* tahun 2012 diketahui bahwa tutupan lahan di UP XII Tambak Osowilangon yang terbesar yaitu permukiman dengan luas 1456,456 ha (27,894%) sedangkan luas tutupan lahan terkecil yaitu lahan kosong 122,045 ha (2,337%). Sedangkan UP XI Tambak Osowilangon permukiman yang seharusnya terbangun pada RDTRK adalah sebesar 1757 ha, akan tetapi pada hasil klasifikasi citra *WorldView-2* tahun 2012 menunjukkan luasan sebesar 1456,456 ha sehingga ketidaksesuaian sebesar 931,648 ha.

Hogy Prima Valeda, Bakti Setiawan, dan Djati Mardiatno (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi Efektivitas Rencana Tata Ruang dalam Mengurangi Risiko Kekeringan di Kawasan Karst dengan Analisis Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Yogyakarta-Sadeng)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah produk Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Yogyakarta-Sadeng telah memperhitungkan aspek keamanan dari bencana, khususnya kekeringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan risiko bencana dari kondisi eksisting dengan risiko bencana yang muncul dari penerapan produk rencana. Hasil penelitian yang didapatkan adalah apabila Rencana Tata Ruang dilaksanakan, 66 % wilayah studi akan mengalami penurunan risiko kekeringan, sementara 34 % sisanya akan mengalami kenaikan risiko bencana.

Dion Prabu Septa Bima (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ketidaksiharasan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis agihan wilayah yang memiliki ketidaksiharasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan serta menganalisis faktor yang menyebabkan ketidaksiharasan antara penggunaan lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi citra penginderaan jauh kemudian dilakukan survei lapangan dan wawancara guna mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaksiharasan penggunaan lahan terhadap RDTR. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksiharasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebedar 3,15 % serta faktor utama yang menyebabkan ketidaksiharasan penggunaan lahan yakni faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang tinggi.

M.L.S Karim, S. Rahayu (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Kesesuaian Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Studi Kasus Sebagian Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

melakukan evaluasi kesesuaian konversi lahan pertanian ke non pertanian terhadap RDTRK antara tahun 2008-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menganalisis data dari survei primer maupun survei sekunder. Hasil dari interpretasi citra dari tahun 2008-2011, menunjukkan pada wilayah sebagian Kecamatan Ungaran Timur telah mengalami konversi lahan.

Trigus Eko, Sri Rahayu (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus : Kecamatan Mlati”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji perubahan guna lahan pada masa itu, dan ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dan dokumen Rencana Detail Tata Ruang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis foto udara dan gambar satelit melalui proses overlay dan analisis *input-output*, disertai analisis SWOT atas kebijakan-kebijakan guna lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10,32% guna lahan di Mlati berubah sepanjang kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan hilangnya 290,67 *acre* area pertanian dengan 13,12% diantaranya berubah menjadi permukiman. Namun demikian, 65,9% dari guna lahan disana masih sesuai dengan dokumen perencanaan.

Di bawah ini akan disajikan ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan analisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap rencana detail tata ruang pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Anita Dwijayanti, Teguh Hariyanto (2015)	Evaluasi Tutupan Lahan Permukiman Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) Surabaya Pada Citra Resolusi Tinggi Dengan Metode Klasifikasi Berbasis Objek Studi Kasus : UP XI Tambak Osowilangon Dan UP XII Sambikerep)	Mengevaluasi tutupan lahan khususnya permukiman menggunakan metode klasifikasi berbasis objek terhadap RDTRK.	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode klasifikasi berbasis objek dengan menggunakan segmentasi dan <i>merging</i> dalam prosesnya	Hasil klasifikasi berbasis objek citra <i>WorldView-2</i> tahun 2012 diketahui bahwa tutupan lahan di UP XII Tambak Osowilangon yang terbesar yaitu permukiman dengan luas 1456,456 ha (27,894%) sedangkan luas tutupan lahan terkecil yaitu lahan kosong 122,045 ha (2,337%). Sedangkan UP XI Tambak Osowilangon permukiman yang seharusnya terbangun pada RDTRK adalah sebesar 1757 ha, akan tetapi pada hasil klasifikasi citra <i>WorldView-2</i> tahun 2012 menunjukkan luasan sebesar 1456,456 ha sehingga ketidaksesuaian sebesar 931,648 ha.
Hogy Prima Valeda, Bakti Setiawan, dan Djati Mardiatno (2015)	Kajian Kesesuaian Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Studi Kasus Sebagian Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang	Melihat apakah produk Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Yogyakarta-Sadeng telah memperhitungkan aspek keamanan dari bencana, khususnya kekeringan	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah membandingkan risiko bencana dari kondisi eksisting dengan risiko bencana yang muncul dari penerapan produk rencana	Hasil penelitian yang didapatkan adalah apabila Rencana Tata Ruang dilaksanakan, 66 % wilayah studi akan mengalami penurunan risiko kekeringan, sementara 34 % sisanya akan mengalami kenaikan risiko bencana.
Dion Prabu Septa Bina (2015)	Analisis Ketidakselarasan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2015	Menganalisis agihan wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan • Menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakselarasan	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi citra penginderaan jauh kemudian dilakukan survei lapangan dan wawancara guna mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakselarasan penggunaan lahan	Hasil penelitian menunjukkan ketidakselarasan penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebesar 3,15 % serta faktor utama yang menyebabkan ketidakselarasan penggunaan lahan yakni faktor ekonomi dan kebutuhan hidup

		antara penggunaan lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan	terhadap RDTR	yang tinggi.
M.L.S Karim, S. Rahayu (2014)	Kajian Kesesuaian Korversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Studi Kasus Sebagian Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.	Melakukan evaluasi kesesuaian konversi lahan pertanian ke non pertanian terhadap RDTRK antara tahun 2008-2011	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menganalisis data dari survei primer dan survei sekunder	Hasil penelitian menunjukkan pada wilayah sebagian Kecamatan Ungaran Timur telah mengalami konversi lahan
Trigus Eko, Sri Rahayu (2012)	Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus : Kecamatan Mlati.	Mengkaji perubahan guma lahan pada masa itu, dan ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis foto udara dan gambar satelit melalui proses <i>overlay</i> dan analisis <i>input-output</i> , disertai analisis SWOT atas kebijakan-kebijakan guna lahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10,32% guna lahan di Mlati berubah sepanjang kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan hilangnya 290,67 <i>acre</i> area pertanian dengan 13,12% diantaranya berubah menjadi permukiman. Namun demikian, 65,9% dari guna lahan disana masih sesuai dengan dokumen perencanaan.
* Anggi Rizky Damayanti Satria 2018	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta 	Metode dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian observasi tidak langsung dan analisis pendekatan keruangan. Dimana analisis pendekatan keruangan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan.	Hasil yang diharapkan yakni Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual Terhadap RDTR Kecamatan Depok, Sleman Tahun 2011-2021, dan faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR Kecamatan Depok

Sumber : *Studi literatur, 2018*

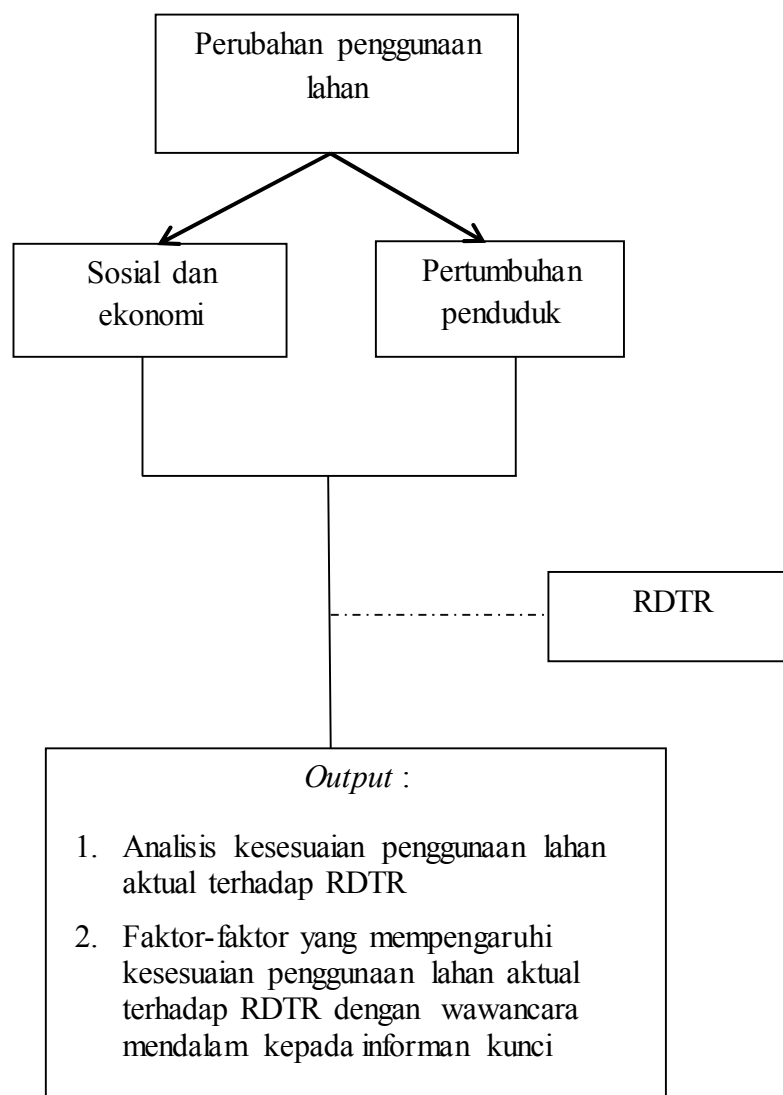
1.6 Kerangka Penelitian

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan (Lisdiono, 2004). Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Khadiyanto, 2005). Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi (Sujarto, 1985 dalam Untoro, 2006). Keterbatasan lahan di perkotaan juga menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota.

Perkembangan perubahan penggunaan lahan nonpertanian di Kecamatan Depok tahun 2009-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 896,4 ha selama kurun waktu 7 tahun. Perkembangan fisik penggunaan lahan tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar memperhatikan karakteristik, fungsi, dan kemampuan lahannya. Pengaturan bentuk penggunaan lahan atau penataan ruang dalam suatu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi dari pemanfaatan ruang. Evaluasi penggunaan lahan yang dilakukan adalah evaluasi penggunaan lahan aktual terhadap RDTR. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi citra tidak langsung dan wawancara mendalam untuk mendapatkan faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap RDTR.

Analisis peta kesesuaian diperoleh dari *overlay* penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diperoleh dari BPN. Analisis peta kesesuaian dilakukan untuk menghasilkan evaluasi penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Kecamatan Depok menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis. Klasifikasi kesesuaian penggunaan lahan ada 3 kategori yakni sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. Klasifikasi sesuai apabila penggunaan lahan aktual sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. Klasifikasi belum sesuai apabila penggunaan lahan aktual belum terbangun atau masih berfungsi pemanfaatan

ruang direncanakan atau merupakan fungsi awal lahan sebelum direncanakan. Klasifikasi tidak sesuai apabila penggunaan lahan aktual tidak sama atau berbeda dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Diagram Kerangka Pemikiran

1.7 Batasan Operasional

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink,1975).

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto *et al*,2011).

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UU No. 26 Tahun 2007).

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang diimplementasikan pada struktur wilayah dan kawasan-kawasan tertentu yang telah ditentukan (UU. No. 26 Tahun 2007).

Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan hubungan yang terdapat diantara unsur-unsur geografis (Prahasta,2006).

Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengkombinasikan data *layer*/tematik yang menjadi masukannya (Prahasta,2006).